**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Era reformasi dan dampak persaingan globalisasi mendorong percepatan perubahan perbaikan kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah dituntut bekerja lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika dalam mendukung reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintah dan pembangunan. Pemerintah setiap tahun meningkatkan anggaran gaji pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat menjalankan tugas pelayanan yang lebih responsif, tepat waktu dan berkualitas. Hal ini dilakukan untuk perbaikan kualitas hidup dan terciptanya sistem kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat mendorong motivasi kerja.

Dalam ruang lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN), gaji memiliki definisi sendiri yakni pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok di tambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak di terima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

Ketentuan umum undang-undang ketenagakerjaan, upah di rumuskan sebagai hak pekerja yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga.

Sistem penggajian merupakan salah satu kegiatan pokok sistem informasi akuntansi yang di rancang untuk menangani perhitungan gaji dan pembayaran pada pegawai. Sehubungan mengenai gaji, terdapat beberapa hal menenai gaji salah satunya adalah gaji merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada pemimpin, pengawas, pegawai tata usaha, pegawai kantor serta para manajer lainnya. Proses pembayaran gaji biasanya diberikan dalam setiap bulannya. Gaji biasanya tingkatannya lebih tinggi dari pada pembayaran-pembayaran kepada pekerja-pekerja upahan. Sehingga dapat munculnya kepuasan kerja dari pegawai, dapat meningkatkan motivasi dalam bekerja dan kualitas kinerja setiap pegawai. Pada umumnya bagian penggajian merancang dan mengadministrasikan gaji pegawai, dan memerlukan suatu sistem penggajian yang baik. Penggajian perlu di kelola secara profesional dan baik untuk menghindari terjadinya suatu manipulasi oleh pihak-pihak tertentu dan pengelola gaji tidak sesuai dengan prosedur yang di berikan menimbulkan penurunan produktivitas pegawai.

Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawsi Utara merupakan Badan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup Badan lingkungan Hidup merupakan instansi daerah yang berorientasi kepada urusan lingkungan. Berdasarkan peraturan Daerah sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2006, maka Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara juga harus membuat pertanggung jawaban atas kewenangan yang di laksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang penulis temui pada Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara bahwa sistem akuntansi pembayaran gaji sebenarnya sudah memadai namun ada kendala-kendala yang terjadi sehingga mengakibatkan keterlambatan gaji.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian yang berjudul “**Analisis Sistem Akuntansi Penggajian dan Pembayaran Kas pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara”.**

* 1. **Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahannya dapat di rumuskan yaitu bagaimana sistem akuntansi penggajian dan pembayaran kas pada Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara dan apakah sudah memadai.

* 1. **Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem akuntansi penggajian dan pembayaran kas pada Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara apakah sudah memadai atau belum.

* 1. **Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara

Dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada bagian keuangan Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara sebagai suatu bahan pertimbangan dalam merumuskan setiap kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan sistem penggajian.

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan mengenai sistem akuntansi penggajian dan pembayaran kas yang diterapkan oleh Kantor Badan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara.

1. Bagi Politeknik Negeri Manado

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan terhadap pengembangan kurikulum serta menambah pengetahuan.